



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UMARDANI YUSUF WAHYUDI
2. Jabatan : PENILAI PEMERINTAH
3. NHK : 475271

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **450.000.000**

1. Tanah Seluas 593 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. Tanah Seluas 664 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 4.500 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 2.300 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 11.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **96.500.000**

1. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000



5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	80.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	626.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	626.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.